

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Dalam melaksanakan efektivitas pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib yang dilaksanakan di lingkungan sekolah tentunya tidak terlepas dari pengertian efektivitas itu sendiri, demi tercapainya segala tujuan yang di harapkan. Sekolah itu sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan tempat belajar dimana anak akan berusaha membina, mengembangkan dan menyempurnakan segala potensi yang ada pada diri anak menuju proses pendewasaan.

Efektivitas sudah pasti berbicara tentang pemanfaatan segala sarana dan prasarana untuk menunjukkan keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian (2001:24) yang memberikan definisi:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Sejalan dengan pendapat di atas, maka suatu pekerjaan dapat tercapai pada sasarannya apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan secara efektif. Sedangkan definisi efektivitas menurut Strees (1985:87) yaitu :

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program.

B. Pemberian Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Sanksi atau hukuman merupakan salah satu alat pendidikan refresif yang diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa yang melakukan pelanggaran dalam upaya menegakan aturan atau tata tertib sekolah, menurut Poerwadaminta (1999:860) dalam kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) “sanksi berarti tanggungan (tindakan, hukuman) yang dilakukan untuk memaksa seseorang menepati atau menaati apa-apa yang sudah ditentukan”.

Beberapa ahli diantaranya Langeveld dalam Kartini Kartono (1992:261) mengemukakan bahwa :

Hukuman adalah perbuatan yang dengan sadar dan disengaja diberikan serta mengakibatkan nestapa pada anak atau sesame manusia yang menjadi tanggungan kita dan pada umumnya ada dalam kondisi yang lebih lemah secara fisik maupun psikis daripada kita, juga memerlukan kita.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bertujuan agar peserta didik bisa menyadari kesalahan dan tidak melakukan lagi hal tersebut. Dengan hukuman maka diharapkan peserta didik atau seseorang bisa kembali taat pada tata tertib atau peraturan yang telah dibuat.

Pemberian sanksi itu bias berupa hukuman, sebab bila peserta didik diberi peringatan dan masih tetap melakukan pelanggaran di sekolah maka peserta didik tersebut harus diberi sanksi berupa hukuman.

Menurut Tanlain dkk. (1996:56) hukuman atau sanksi adalah “tindakan pendidik terhadap anak didik karena melakukan kesalahan dan dilakukan agar anak didik tidak melakukannya lagi”. Berdasarkan pengertian ahli tersebut dapat

disimpulkan bahwa sanksi diberikan kepada peserta didik karena adanya kesalahan dan dilakukan peserta didik tersebut, dan dengan diberikannya hukuman tersebut dengan tujuan agar peserta didik tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi, kemudian merasakan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan atau pelanggaran yang di perbuatnya.

Hukuman sebagai alat pendidikan harus mampu menimbulkan keinsyafan pada anak, sehingga ketika dia berbuat kesalahan maka akan bersedia untuk memperbaiki tingkah lakunya. Oleh karena itu Kartini Kartono (1992:262) berpendapat bahwa hukuman harus mempunyai nilai pedagogis yang terdiri dari 1. Apabila hukuman itu membantu anak untuk bisa bertanggung jawab dan mandiri secara sosial, 2. Mampu mengenali kebaikan dan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik.

Berdasarkan pendapat di atas setiap hukuman harus mempunyai nilai pedagogis dan diharapkan dapat memberi motivasi pada anak agar lebih bertanggung jawab dan menjadi mandiri sehingga akhirnya anak tersebut melakukan perbuatan baik. Hukuman di dalam pemberiannya harus disertai penjelasan dan diakhiri dengan pemberian maaf, dengan demikian anak tidak merasa direndahkan tetapi mereka akan lebih menyadari dan mengerti akan kesalahan mereka.

Adapun Suwarno (1981:115) mengemukakan bahwa “menghukum adalah memberikan atau mengadakan penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasainya untuk menuju ke arah perbaikan”.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada peserta didik yang diberikan oleh seorang guru di sekolah karena adanya pelanggaran terhadap tata tertib atau peraturan di sekolah, dengan maksud agar seseorang tersebut menjadi sadar akan perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

2. Bentuk Pemberian Sanksi

Jenis atau bentuk hukuman yang dijatuhkan berbagai macam. J.J. Hasibuan (1988:56-61) menerapkan tentang bentuk sanksi atau hukuman tersebut, yaitu:

a. Bentuk Hukuman

Bentuk-bentuk hukuman kurang lebih dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

- 1) Hukuman fisik misalnya dengan mencubit, menapar, memukul dan lain sebagainya.
- 2) Hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, seperti omelan, ancaman, kritikan, sindiriran, cemoohan dan lain sejenisnya.
- 3) Hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan misalnya menuding, memelototi, mencemburuti dan lain sebagainya.
- 4) Hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan misalnya disuruh berdiri di depan kelas, di dikeluarkan dari dalam kelas, di dudukan di samping guru, di suruh menulis suatu kalimat sebanyak puluhan atau ratusan kali dan lain sebagainya.

Sedangkan hukuman administratif seperti yang di ungkapkan Syafaat *et al* (2008:145) antara lain:

- 1) Berupa surat peringatan
- 2) Skorsing
- 3) Denda
- 4) Dikeluarkan dari sekolah
- 5) Pemberian/pembebanan tugas-tugas sekolah atau pelajaran
- 6) Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan sekolah

Lain halnya pendapat Dadang Hawari (Syafaat *et al*, 2008:144) yang menyebutkan penerapan sanksi bagi peserta didik yaitu:

- 1) Sanksi hukum

- 2) Hukuman untuk menegakkan disiplin berupa tindakan fisik
- 3) Hukuman untuk menegakkan disiplin berupa sanksi administratif

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat hukuman yaitu hukuman fisik, hukuman dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan, hukuman dengan tindakan yang tidak menyenangkan. Sedangkan hukuman administratif terdapat enam bentuk hukuman.

3. Tata Tertib Sekolah

a. Pengertian Tata Tertib

Tata tertib adalah patokan seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang dipaparkan Indrakusuma (1973-140) tata tertib sebagai “sederetan peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam tata kehidupan tertentu. Tata tertib merupakan patokan seseorang untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan oleh keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki tujuan membentuk manusia yang berkualitas, tentunya sangat diperlukan suatu aturan guna mewujudkan tujuan tersebut. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan bahwa “peraturan tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan”.

Menurut Wawasan Wiyatama Mandala (1993-21) mengenai tata tertib sekolah ditegaskan bahwa “peraturan tata tertib sekolah secara oprasional untuk mengatur perilaku atau sikap siswa, dalam peraturan tata tertib sekolah dikemukakan hal-hal yang diharuskan, dianjurkan dan tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan sekolah”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib sekolah adalah aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah tersebut, aturan memuat hal-hal yang dilarang bagi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah dan

apabila mereka melakukan kesalahan maka pihak sekolah berwenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan Tata Tertib

Tata tertib memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang kelancaran dan ketertiban lingkungan serta suasana yang damai dalam pembelajaran, hal ini dipaparkan oleh Kusmiati (2004-22) yaitu:

- 1) Tujuan peraturan keamanan adalah untuk mewujudkan rasa aman dan tenang serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun batin yang dilaksanakan oleh seluruh warga, sebab jika antar individu tidak saling mengganggu maka akan melahirkan perasaan tenang dalam diri setiap individu dan siap untuk mengikuti kegiatan sehari-hari
- 2) Tujuan peraturan kebersihan adalah terciptanya suasana bersih dan sehat yang terasa dan nampak pada seluruh warga
- 3) Peraturan ketertiban adalah menciptakan kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan bahkan cara berpakaian
- 4) Tujuan peraturan keindahan adalah untuk menciptakan lingkungan yang baik sehingga menimbulkan rasa keindahan bagi yang melihat dan yang menggunakannya
- 5) Tujuan peraturan kekeluargaan adalah untuk membina tata hubungan yang baik antar individu yang mencerminkan sikap dan rasa gotong royong, keterbukaan, saling membantu, tenggang rasa dan menghormati.

Berdasarkan pendapat diatas maka untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, bersih dan penuh kekeluargaan merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Agar proses interaksi antar warga dalam rangka

penanaman dan pengembangan nilai, keterampilan dan wawasan dapat dilaksanakan.

c. Fungsi Tata Tertib di Sekolah

Tata tertib sekolah mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu membiasakan anak mengendalikan dan mengekang perilaku yang di inginkan, senada dengan dikemukakan oleh Hurlock (1990-85) bahwa fungsi tata tertib adalah sebagian berikut:

- 1) Peraturan mempunyai nilai pendidikan sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui kelompok tersebut
- 2) Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak di inginkan.

Oleh karena itu tata tertib sekolah berperan sebagai pedoman perilaku peserta didik, Hurlock (1990-76) mengemukakan kembali bahwa “peraturan berfungsi sebagai pedoman perilaku anak dan sebagai sumber motivasi untuk bertindak sebagai harapan sosial”. Peraturan juga merupakan salah satu unsur disiplin untuk berperilaku. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan kembali oleh Hurlock (1990-84):

Bila disiplin mampu mendidik anak-anak untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, ia harus memiliki empat unsur pokok, apapun cara mendisiplinkan yang digunakan yaitu: peraturan sebagai pedoman berperilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan untuk mengajak dan memaksakannya, hukuman untuk pelanggaran peraturan dan penghargaan untuk perilaku yang sejalan dengan perilaku yang berlaku.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib sekolah berisikan larangan terhadap peserta didik dalam suatu perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi peserta didik yang melanggarnya. Tata tertib sekolah berfungsi untuk mendidik dan membina perilaku peserta didik di sekolah, karna tata tertib berisikan keharusan yang harus dilaksanakan peserta didik.

d. Sikap Kepatuhan Peserta Didik Terhadap Tata Tertib di Sekolah

Kepatuhan peserta didik terhadap tata tertib sekolah seharusnya bukan karna paksaan atau tekanan dari pihak lain tetapi bersumber dari dirinya sendiri. Kepatuhan yang baik adalah yang didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan-peraturan atau larangan-larangan yang terdapat dalam tata tertib tersebut.

Menurut Djahiri (1985-25) tingkat kesadaran dan atau kepatuhan seseorang terhadap tata tertib meliputi:

- 1) Patuh karna takut pada orang atau kekuasaan atau paksaan
- 2) Patuh karna ingin dipuji
- 3) Patuh jarna kiprah umum atau masyarakat
- 4) Taat atas dasar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban
- 5) Taat karna dasar keuntungan atau kepentingan
- 6) Taat karna hal tersebut memang memuaskan baginya
- 7) Patuh karna dasar prinsip etis yang layak

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran seseorang khususnya peserta didik untuk mematuhi tata tertib memang sangat penting. Selain bertujuan untuk ketertiban juga berguna untuk mengatur perilaku peserta didik agar sesuai dengan norma yang berlaku. Hoefnagels dalam Soekanto (1982:234) membedakan macam-macam kepatuhan derajat kepatuhan hukum sebagai berikut:

- 1) Seseorang berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum dan menyetujui yang mana yang sesuai dengan sistem nilai dari mereka yang berwenang
- 2) Seseorang berperilaku bagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju akan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan

- 3) Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai penguasa
- 4) Seseorang tidak patuh kepada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang

Selanjutnya Blersted dalam Soekanto (1982:225-226) mengemukakan dasar-dasar kepatuhan atau faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang mematuhi aturan-aturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 1) *Indoctrination*, sebab pertama seseorang mematuhi kaedah-kaedah adalah karna di indoktrinir untuk berbuat demikian.
- 2) *Habitution*, seseorang mematuhi kaedah-kaedah oleh karna sejak kecil dia mengalami proses sosialisasi maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku.
- 3) *Utility*, adalah salah satu faktor yang menyebabkan orang taat paa kaedah dikarnakan kegunaan pada kaedah tersebut.
- 4) *Group Identification*, faktor penyebab seseorang menjadi patuh pada kaedah adalah karna kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan indentifikasi dengan kelompok.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat bermacam-macam derajat kesadaran atau kepatuhan seseorang terhadap kaidah, norma atau aturan yang berlaku mulai dari derajat kesadaran atau kepatuhan paling tinggi sampai yang terendah (atas dasar kesadaran pribadi sampai yang berbentuk keterpaksaan). Begitupula dengan derajat peserta didik dalam mentaati tata tertib yang ada di sekolah, ada yang sadar mentaatinya karna merupakan kewajibannya, ada juga yang merasa terpaksa dalam menaati peraturan karna merasa takut akan sanksi yang diberikan apabila melanggarnya

4. Bentuk-bentuk Pelanggaran Disiplin Di Sekolah

Menurut Kooi dan Schutx (dalam Sukadji, 2000), hal-hal yang dianggap sebagai perilaku pelanggaran disiplin dapat digolongkan dalam lima kategori umum, yaitu:

- a. Agresi fisik (pemukulan, perkelahian, perusakan, dan sebagainya).
- b. Kesibukan berteman (berbincang-bincang, berbisik-bisik, berkunjung ke tempat duduk teman tanpa izin).
- c. Mencari perhatian (mengedarkan tulisan-tulisan, gambar-gambar dengan maksud mengalihkan perhatian dari pelajaran).
- d. Menantang wibawa guru (tidak mau nurut, memberontak, memprotes dengan kasar, dan sebagainya), dan membuat perselisihan (mengkritik, menertawakan, mencemoohkan).
- e. Merokok di sekolah, datang terlambat, membolos, dan "kabur", mencuri dan menipu, tidak berpakaian sesuai dengan ketentuan, mengompas (memeras teman sekolah), serta menggunakan obat-obatan terlarang maupun minuman keras di sekolah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran disiplin di sekolah diantaranya adalah agresi fisik, kesibukan berteman, mencari perhatian, menantang wibawa guru dan pelanggaran yang lainnya.

5. Efektifitas Sanksi Bagi Peserta Didik

Sanksi dapat dilakukan kapan saja oleh guru, pembimbing, kepala sekolah, apabila ia berada di sekolah atau orang tua, pihak berwajib dan masyarakat apabila ia berada di luar jam sekolah. Disini hal yang paling penting adalah dampak dari sanksi, baik terhadap peserta didik yang berlaku tidak disiplin, maupun terhadap peserta didik yang lain.

Jika dampak atau hasil yang diharapkan dari kebijakan pemberian sanksi tidak ada, maka itu merupakan pekerjaan yang sia-sia. Pengaruh pemberian sanksi berkaitan dengan perilaku peserta didik yang diinginkan setelah

pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah diperbuat peserta didik, pengaruh sanksi tidak hanya dilihat terhadap peserta didik yang menerimanya, tetapi juga terhadap peserta didik yang lain. Menurut Clemen (2001), ada beberapa pertanda yang menunjukkan bila hukuman dan disiplin sekolah mungkin tidak sesuai untuk diterapkan, sehingga anak sulit untuk mematuhi disiplin sekolah disebabkan oleh:

- a. Seorang anak yang mempunyai citra diri yang sangat buruk dan sangat dipengaruhi oleh keagalannya sendiri pasti membutuhkan penghargaan.
- b. Seorang anak yang takut mencoba hal-hal yang baru, takut menerima tantangan dan sulit melakukan kegiatan yang melelahkan mungkin akan lebih bersemangat bila diberikan penghargaan.
- c. Seorang anak yang sangat manja dan takut melakukan tugasnya sendirian perlu diberikan penghargaan jika ia ternyata melaksanakan tugasnya tanpa bantuan orang lain.
- d. Seorang anak yang merasa kecewa karena selalu dibandingkan dengan yang lebih pintar, lebih rajin, lebih mandiri, dan lebih aktif, perlu diberikan penghargaan agar dia merasa mampu untuk berhasil.
- e. Seorang anak yang sering memperhatikan citra diri yang negatif atau perasaan takut yang berlebihan adalah anak yang mungkin membutuhkan penghargaan.
- f. Seorang anak yang mengalami gangguan fisik, motorik, atau organik, dan karena kesulitan semacam itu sering mengalami kegagalan dibandingkan anak lainnya yang sebaya dengannya, perlu diberikan tugas yang sesuai dengan kebutuhannya yang khas dan juga perlu diberikan penghargaan atas keberhasilannya dalam melaksanakan tugasnya.

Di sekolah-sekolah yang tata tertibnya tidak konsisten biasanya akan terjadi berbagai macam masalah yang sangat menghambat proses belajar mengajar. Selain itu, tidak terlaksanakannya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan peserta didik, baik di dalam maupun di luar sekolah. Walaupun setiap sekolah telah mempunyai peraturan tersendiri bukanlah berarti sekolah tersebut tidak menemukan berbagai bentuk pelanggaran. Pelanggaran terhadap peraturan sekolah kerap dilakukan oleh para peserta didik, oleh karena itu sanksi harus tetap diterapkan secara konsisten demi terciptanya sikap disiplin pada peserta didik.

C. Tinjauan Tentang Disiplin

1. Pengertian Disiplin

Disiplin merupakan suatu keadaan yang tertib, dimana seseorang mengikuti pola-pola tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Soekanto, 1986:79). Hal tersebut senada dengan ungkapan Tu'u (2004:8) yang memaknai disiplin sebagai kesadaran diri yang muncul dari batin terdalam untuk mengikuti dan menaati peraturan-peraturan, nilai-nilai hukum yang berlaku dalam satu lingkungan tertentu. Sedangkan menurut "*Dictionary of Education*", disiplin adalah peraturan secara langsung dalam mengawal siswa melalui hukuman atau ganjaran, dan suatu bentuk latihan bagi perkembangan mental atau sikap seseorang.

Istilah disiplin berasal dari bahasa latin "*disciplina*". Makna kata disiplin dapat dipahami dalam kaitannya dengan: (a) latihan yang memperkuat, (b) koreksi dan sanksi, (c) kendali atau terciptanya ketertiban dan keteraturan, dan (d) sistem aturan tata laku (LEMHANNAS, 1997:2).

Senada dengan pengertian di atas, Budimansyah (2000:48) menyebutkan bahwa arti disiplin adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan atau pengendalian.
- b. Latihan yang bertujuan mengembangkan watak agar dapat mengendalikan watak agar dapat mengendalikan diri, agar berperilaku tertib dan efisien.
- c. Suatu sistem peraturan atau metode yaitu cara berperilaku.
- d. Hukuman atau koreksi terhadap seseorang yang melanggar ketentuan peraturan yang dilakukan melalui latihan atau dengan jalan mendera.
- e. Hasil latihan (pengendalian diri) perilaku tertib.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin mengandung arti sebuah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku, atas dasar kesadaran dari diri sendiri bukan atas paksaan dari orang lain.

2. Unsur-Unsur Disiplin

Menurut Tulus Tu'u (2004:33) unsur-unsur disiplin adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku;
- b. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan, dan dorongan dari luar dirinya;
- c. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan;

- d. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan, dan memperbaiki tingkah laku;
- e. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa disiplin merupakan cerminan kepatuhan dan ketaatan seseorang terhadap segala peraturan dan nilai yang telah ditetapkan di sebuah lingkungan. Apabila disiplin diharapkan mampu mendidik peserta didik berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, maka ia harus mempunyai empat unsur pokok seperti yang diungkapkan oleh Hurlock (1987) dalam Tanzil (2012:101), yaitu: a) Peraturan, b) Hukuman, c) penghargaan, dan d) Konsisten.

a. Peraturan

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin ditetapkan oleh guru di lingkungan sekolah, orang tua di lingkungan keluarga dan teman bermain di lingkungan sosial. Tujuan adanya peraturan adalah untuk mewujudkan anak lebih bermoral dengan pedoman perilaku yang diakui dalam situasi tertentu. Peraturan yang jelas dan efektif akan membantuk peserta didik agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Dengan demikian, fungsi peraturan itu ialah sebagai nilai pendidikan dan preventif. Fungsi sebagai nilai pendidikan dimaksudkan bahwa peraturan digunakan sebagai alat memperkenalkan perilaku yang disetujui anggota kelompok kepada peserta didik. Sedangkan fungsi preventif digunakan sebagai alat yang dapat membantu dalam mengekang atau mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

b. Hukuman

Hurlock (1999:89) menyatakan bahwa “hukuman berarti menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan”. Hukuman memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kedua, dari hukuman dapat terbentuk sebuah pola yang mampu mendidik masyarakat. Ketiga, hukuman memberikan motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Pengetahuan serta pemahaman tentang akibat tindakan yang salah satu perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut.

Dengan demikian fungsi hukuman adalah untuk membuat jera terhadap siapa saja yang melanggar peraturan. Disiplin yang dihubungkan dengan hukuman adalah disiplin yang ada hubungannya dengan orang lain. Artinya hukuman tersebut berarti sebuah konsekuensi yang harus dihadapi ketika melakukan pelanggaran hukum.

c. Penghargaan

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus pemberian hadiah atas prestasi yang telah diraih oleh seseorang. Bentuk dari penghargaan ini tidak selamanya berbentuk materi, tetapi juga dapat berupa kata-kata pujian, senyuman atau tepukan di punggung dan belaian. Adapun peranan dari penghargaan dapat dikategorikan ke dalam tiga hal, yaitu: 1) penghargaan mempunyai nilai mendidik, 2) penghargaan berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang disetujui secara sosial, dan 3) tidak adanya penghargaan melemahkan perilaku. Dengan demikian penghargaan mutlak diberikan kepada seseorang yang berprestasi agar lebih semangat lagi.

d. **Konsistensi**

Disiplin tidak mungkin terlaksana tanpa adanya konsistensi. Konsistensi menggambarkan tingkat keseragaman, kestabilan atau adanya kecenderungan menuju kesamaan. Konsisten memiliki fungsi yang besar, yaitu memberikan motivasi yang kuat kepada siswa agar supaya terlatih dan terbiasa dengan segala hal yang bersifat tetap, sehingga ia melakukan tindakan yang baik dan menjauhi tindakan yang buruk. Selain itu, dapat membentuk perkembangan siswa untuk menghormati peraturan-peraturan di lingkungan dimana ia berada.

3. Indikator Disiplin Di Sekolah

Menurut Tu'u (2004: 91) dalam penelitiannya mengenai disiplin sekolah menemukan indikator yang menunjukkan perubahan hasil belajar peserta didik sebagai kontribusi mengikuti dan menaati peraturan sekolah. Indikator tersebut meliputi:

- a. Dapat mengatur waktu belajar di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan meluangkan waktu belajar dirumah secara optimal
- b. Rajin dan teratur belajar
- c. Perhatian yang baik saat belajar di kelas
- d. Ketertiban diri saat belajar.

Sedangkan Daryanto (2013: 135) menjelaskan indikator disiplin di sekolah dan di kelas. Indikator di sekolah meliputi:

- a. memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin
- b. memiliki tata tertib sekolah
- c. membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin
- d. membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin
- e. menegakkan aturan dengan memberikan sanksi secara adil bagi pelanggar tata tertib sekolah.

Indikator di kelas meliputi:

- a. membiasakan mematuhi aturan

- b. menggunakan pakaian praktik sesuai dengan program studi keahliannya
- c. penyimpanan dan pengeluaran alat dan bahan (sesuai program studi keahlian).

Disiplin adalah sikap peserta didik yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yaitu tata tertib yang dilakukan dengan senang hati dan kesadaran diri. Sedangkan tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat dilingkungan sekolah, dan harus dipatuhi setiap warga sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa indikator disiplin belajar diantaranya adalah perhatian yang baik saat belajar di kelas, ketertiban diri saat belajar, membiasakan mematuhi aturan, mengerjakan tugas dan menaati tata tertib sekolah.

D. Tinjauan Tentang Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran mengandung pengertian belajar dan mengajar. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain, kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh peserta didik atau pembelajar dan oleh guru atau pengejar. Hal tersebut telah dikemukakan oleh Mahfuddin (2008: 15) bahwa “kegiatan mengajar dilakukan oleh guru dan kegiatan belajar dilakukan oleh siswa, yang keduanya saling berinteraksi dan saling terkait satu sama lain”.

Diungkapkan juga oleh Mahfuddin (2008: 15) bahwa “pembelajaran juga di artikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan kepribadian siswa”. Pendapat tersebut juga senada dengan apa yang dipaparkan Burton dalam Agustika (2012: 10) bahwa pembelajaran adalah “upaya memberikan rangsangan, bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada siswa agar

terjadi proses belajar”. Pembelajaran memfasilitasi peserta didik atau pembelajar dalam mengembangkan potensi, percakapan dan kepribadiannya.

Dengan demikian pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar, dimana keduanya tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Pembelajaran juga berarti upaya untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan kepribadian peserta didik.

2. Model-model Pembelajaran

Model-model Pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, teori-teori psikologis, sosiologis, psikiatri, analisis sistem, atau teori-teori lain (Joyce & Well, 1980). Joyce & Well mempelajari model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi empat model pembelajaran yaitu:

a. Model Interaksi Sosial

Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt (*field-theory*). Model Interaksi Sosial menitikberatkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat (*learning to life together*). Teori pembelajar Gestalt dirintis oleh Max Wertheimer (1912) bersama dengan Kurt Koffka dan W. Kohler, mengadakan eksperimen mengenai pengamatan visual dengan fenomena fisik. Percobaannya yaitu memproyeksikan titik-titik cahaya (keseluruhan lebih penting daripada bagian). Pokok pandangan Gestalt adalah obyek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Makna suatu objek atau peristiwa adalah terletak pada keseluruhan bentuk (*gestalt*) dan bukan bagian-bagiannya. Pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara utuh bukan bagian-bagian.

b. Model Pemrosesan Informasi

Model ini berdasarkan teori belajar kognitif (Piaget) dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan: mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep dan menggunakan symbol verba dan visual. Teori pemrosesan informasi atau kognitif di pelopori oleh Robert Gagne (1985). Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian diolah sehingga menghasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal (keadaan individu, proses kognitif) dan kondisi-kondisi eksternal (rangsangan dari lingkungan) dan interaksi antar keduanya akan menghasilkan hasil belajar.

c. Model personal (*Personal Model*)

Model ini bertitik tolak dari teori Humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi siswa yang mampu membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Model ini juga berorientasi pada individu dan perkembangan keakuan. Tokoh humanistik adalah Abraham Maslow (1962), R. Rogers, C. Buhler dan Arthur Comb. Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif, agar siswa merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan dirinya, baik emosional maupun intelektual. Teori humanistik timbul sebagai gerakan memanusiakan manusia. Pada

teori humanistik ini, pendidik harusnya berperan sebagai pendorong, bukan menahan sensitivitas siswa pada perasaannya.

d. Model Modifikasi Tingkah Laku (*Behavioral*)

Model ini bertitik tolak dari teori belajar *behavioristic* , yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk TL dengan cara memanipulasi penguatan (*reinforcement*). Model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Karakteristik model ini adalah dalam hal penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari siswa lebih efisien dan berurutan.

3. Pembelajaran Yang Efektif

Dalam buku Kegiatan Belajar Mengajar Yang Efektif (Departemen Pendidikan Nasional, 2003) pengelolaan pembelajaran yang efektif di kelas meliputi pengelolaan tempat belajar atau ruang kelas, pengelolaan peserta didik, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan materi pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, dan pengelolaan strategi dan evaluasi kegiatan pembelajaran.

a. Pengelolaan Tempat Belajar

Tempat belajar seperti ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAKEM (Pendekatan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). Hasil pekerjaan peserta didik sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajangkan diharapkan memotivasi peserta didik untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik lain. Yang dipajangkan dapat berupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan

pajangan hasil pekerjaan peserta didik dan ditata dengan baik, dapat membantu guru dalam KBM karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah. Pengelolaan tempat belajar meliputi pengelolaan beberapa benda atau objek yang ada dalam ruang belajar seperti meja-kursi, pajangan sebagai hasil karya peserta didik, atau sumber belajar yang ada di kelas.

b. Pengelolaan Peserta Didik

Biasanya pengelolaan peserta didik dilakukan dalam beragam bentuk seperti individual, berpasangan, kelompok kecil, atau klasikal. Beberapa pertimbangan perlu diperhitungkan sewaktu melakukan pengelolaan peserta didik. Antara lain jenis kegiatan, tujuan kegiatan, keterlibatan peserta didik, waktu belajar, dan ketersediaan sarana/prasarana. Hal yang sangat penting perlu diperhitungkan adalah keberagaman karakteristik peserta didik. Guru harus memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu dirancang kegiatan belajar mengajar dengan suasana yang memungkinkan setiap peserta didik memperoleh peluang sama untuk menunjukkan dan mengembangkan potensinya.

c. Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran

Dalam mengelola kegiatan pembelajaran, guru perlu merencanakan tugas dan alat belajar yang menantang, pemberian umpan balik, dan penyediaan program penilaian yang memungkinkan semua peserta didik mampu ‘unjuk kemampuan/mendemonstrasikan kinerja (*performance*)’ sebagai hasil belajar. Inti dari penyediaan tugas menantang ini adalah penyediaan seperangkat pertanyaan yang mendorong peserta didik bernalar atau melakukan kegiatan ilmiah. Para ahli menyebutkan jenis pertanyaan ini sebagai ‘pertanyaan produktif’. Karena itu, dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran ini guru perlu memiliki kemampuan merancang pertanyaan

produktif dan mampu menyajikan pertanyaan sehingga memungkinkan semua peserta didik terlibat baik secara mental maupun secara fisik. Dengan demikian, sedikitnya ada tiga hal strategis yang perlu dikuasai guru dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran yaitu, Reaksi yang diberikan peserta didik (*by respond*), Siklus cara berpikir (*by circular sequence*), Waktu (*by time*) dan Pendekatan pembelajaran (*byteaching style*).

d. Pengelolaan Materi Pembelajaran

Agar guru dapat menyajikan pelajaran dengan baik, dalam mengelola isi pembelajaran paling tidak guru harus menyiapkan rencana operasional KBM dalam wujud silabus terlebih dahulu. Pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Dengan cara ini, pembelajaran untuk peserta didik menjadi lebih bermakna, lebih utuh, dan sangat kontekstual dengan dunianya

e. Pengelolaan Sumber Belajar

Dalam mengelola sumber belajar sebaiknya memperhatikan sumber daya yang ada di sekolah dan melibatkan orang-orang yang ada di dalam sistem sekolah tersebut. Pembahasan tentang pengelolaan sumber belajar meliputi sumber daya sekolah dan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah.

1) Sumber Daya Sekolah

Sumber daya sekolah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam upaya menciptakan iklim sekolah sebagai komunitas masyarakat belajar. Mengapa demikian, karena pencapaian kompetensi tidak hanya dapat dilakukan melalui pembelajaran di kelas. Iklim fisik dan psikologis juga sangat menentukan hasil belajar yang dicapai peserta didik. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan di kelas dalam proses belajar

mengajar, namun dapat dituntaskan oleh iklim sekolah yang menunjang, misalnya menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar lebih lanjut dapat dilakukan melalui berbagai lomba yang bervariasi. Untuk ini seluruh komponen lingkungan sekolah harus diberdayakan, termasuk sumber daya manusia yang ada.

2) Pemanfaatan Sumber Daya Lingkungan

Pemanfaatan sumber daya lingkungan diperlukan dalam upaya menjadikan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat setempat. Sekolah bukanlah tempat yang terpisah dari masyarakatnya. Dengan cara ini fungsi sekolah sebagai pusat pembaharuan dan pembangunan sosial budaya masyarakat akan dapat diwujudkan. Selain itu, lingkungan sangat kaya dengan sumber-sumber, media, dan alat bantu pelajaran. Lingkungan fisik, sosial, atau budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan membuat anak merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram.

E. Tinjauan Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural bahasa dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa PKn wajib dimuat dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan tinggi, sehingga begitu pentingnya mata pelajaran PKn bagi berbagai jenjang pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh Soemantri (2001:299) bahwa:

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dan pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu diprosese guna melatih para sisiwa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengkaji mengenai demokrasi politik yang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan di sekolah, lingkungan masyarakat serta dipengaruhi oleh orang tua yang seluruhnya di proses untuk melatih siswa supaya memiliki pemikiran yang kritis, analitis serta bersikap sesuai dengan pedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Djahiri dalam Fajar (2003:670) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari Pendidikan Ilmu Kewarganegaraan atau IKn dimanapun dan kapanpun sama atau mirip ialah program atau rekayasa pendidikan untuk membina atau membelajarkan anak didik menjadi warga negara yang baik, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nasionalisme (kebangsaan) yang kuat/mantap, sadar dan mampu membina serta melaksanakan hak-hak kewajiban dirinya sebagai manusia, warga masyarakat dan bangsa negaranya, taat azas/kemampuan (*rule of law*),

demokratis dan partisipatif aktif/kreatif/positif dalam bhinekaan kehidupan masyarakat bangsa dan masyarakat madani (*civil society*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kehidupan yang terbuka mendunia (*global*) dan modern tanpa melupakan jati diri masyarakat bangsa dan negaranya.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari Ilmu Kewarganegaraan yang direkayasa sedemikian rupa sehingga dapat mendidik anak bangsa menjadi warga Negara yang baik serta dapat menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.
- c. Berkembang ke arah positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencatutan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam tujuan yang dikemukakan oleh BNSP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mendidik peserta didik agar mampu berpikir kritis serta tanggap terhadap isu kewarganegaraan yang berkembang. Kemudian juga tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah membuat generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia

dalam berbangsa dan bernegara serta mampu berinteraksi dengan bangsa lain dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik.

Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan Pendidikan Nasional di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pendidikan Nasional mendidik peserta didik untuk menjadi pribadi yang cerdas serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar mampu menciptakan generasi yang kreatif, bertanggung jawab, mampu berinteraksi dengan bangsa lain namun tidak meninggalkan karakter-karakter masyarakat Indonesia sesuai dengan BNSP di atas.

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Nce SS (*National Council for The Social Studies*) dalam Syaifullah (2008:76) adalah:

- a. Pengetahuan dan keterampilan guna membantu memecahkan masalah dewasa ini.
- b. Kesadaran terhadap pengaruh sains dan teknologi pada peradaban serta manfaatnya untuk memperbaiki nilai kehidupan.
- c. Kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif.
- d. Kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan terhadap nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan.
- e. Menyadari kita hidup dalam dunia yang terus berkembang yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru serta tata cara hidup yang baru.

- f. Peran serta proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil-wakil rakyat, para pakar dan spesialis.
- g. Keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi.
- h. Kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian dan kerja sama.
- i. Menggunakan seni yang kreatif untuk mensentitifkan dirinya sendiri terhadap pengalaman yang universal serta pada keunikan individu.
- j. Mengasihani serta peka terhadap kebutuhan, perasaan serta cita-cita umat lainnya.
- k. Pengembangan prinsip-prinsip demokrasi serta pelaksanaannya dalam kehidupan demokrasi.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, ditekankan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai subjek pembelajaran bertujuan membentuk kepribadian bangsa yang terampil, sadar teknologi atau mampu mengikuti kemajuan teknologi, mampu berinteraksi dengan sesama umat manusia, seimbang antara hak dan kewajiban, mampu turut serta dalam pembuatan kebijakan melalui wakil-wakil yang mencerminkan kehidupan demokrasi dalam berbangsa dan bertanah air.

3. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu bidang mata pelajaran sosial dan kenegaraan yang memiliki fungsi untuk mendidik karakter seperti dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 37 Ayat (1) bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

4. Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kedisiplinan

Hasil belajar dipengaruhi kedisiplinan peserta didik dalam belajar dan disiplin di sekolah. Kedisiplinan peserta didik merupakan keadaan peserta didik yang taat dan teratur sesuai aturan. Ketika di sekolah memang disiplin perlu di perhatikan. Untuk mendukung kelancaran belajar di sekolah.

Dalam pembelajaran di kelas, disiplin membuat suasana belajar lebih kondusif dan tenang. Pembelajaran di kelas akan berjalan sesuai dengan harapan bila guru dan peserta didik saling bekerja sama dan saling mendukung. Pembelajaran yang kondusif tercipta apabila peserta didik disiplin saat pembelajaran berlangsung di kelas. Peserta didik tidak mengganggu teman, mendengarkan penjelasan guru, dan mengerjakan tugas dengan baik sehingga peserta didik mendapat hasil yang maksimal dalam belajarnya. Jadi, hasil belajar secara tidak langsung dipengaruhi oleh disiplin belajar peserta didik.

Begitu juga dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan, dalam Pendidikan Kewarganegaraan disiplin merupakan salah satu karakter yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik. Sehingga disiplin yang dimiliki peserta didik berhubungan dengan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Hubungan disiplin belajar terhadap hasil belajar Peserta didik menjadi faktor utama dalam keberhasilan penguasaan pelajaran di sekolah. Hasil belajar

merupakan akibat dari disiplin belajar. Dalam hal ini disiplin belajar berarti sikap keteraturan peserta didik dalam belajar.

Hal ini sesuai dengan pendapatnya Tu'u (2004: 15) yang menyatakan disiplin menjadi salah satu faktor dominan dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa. Artinya peserta didik sudah terbiasa belajar dengan teratur tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Secara teori, apabila peserta didik sudah mampu menanamkan disiplin belajar dengan baik, maka hasil belajar akan meningkat.